

PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KARAKTER EKSEKUTIF DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI PERIODE 2021 - 2024

Ayu Puspitha¹; Endang Sri Utami²

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta^{1,2}

Email : ayupuspitha024@gmail.com¹; endang@mercubuana-yogya.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertumpu pada konsep teori agensi, yang menggambarkan adanya ketegangan kepentingan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, sehingga seringkali mendorong praktik menghindari pajak melalui pemanfaatan celah – celah dalam aturan perpajakan, studi ini difokuskan pada sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024, dengan menelaah pengaruh faktor – faktor seperti kepemilikan asing, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap perilaku penghindaran pajak. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang mengandalkan data sekunder dari laporan keuangan tahunan, dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling* untuk memperoleh memperoleh sampel 19 perusahaan dengan total 76 observasi, kemudian dianalisa menggunakan regresi linier berganda yang didukung oleh pengujian asumsi klasik (seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi) serta uji parsial (uji-t) guna memverifikasi hipotesis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti kedua faktor ini cenderung menekan praktik tersebut, sementara koneksi politik justru memberikan pengaruh positif yang signifikan, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam menghindari pajak, secara keseluruhan, penemuan ini menggarisbawahi bahwa struktur kepemilikan asing dan kualitas kepemimpinan dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi kecenderungan ini, sedangkan keterlibatan politik sering kali memperburuk situasi.

Kata Kunci : Kepemilikan Asing; Karakter Eksekutif; Koneksi Politik; *Tax Avoidance*

ABSTRACT

This research is based on the concept of agency theory, which describes the tension of interests between the owner of the company as the principal and the management as the agent, so that it often encourages the practice of tax avoidance through the use of loopholes in tax rules, this research is focused on the mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2024, by examining the influence of factors such as foreign ownership, executive character, and political connections to tax-evading behavior. In its implementation, this study adopts a quantitative approach that relies on secondary data from annual financial statements, collected through purposive sampling techniques to obtain a sample of 19 companies with a total of 76 observations, then analyzed using multiple linear regression supported by classical assumption testing (such as normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, and autocorrelation test) as well as partial test (t-test) to verify Hypothesis. The results show that foreign ownership and executive character have a significant negative influence on tax avoidance, which means that both factors tend to suppress the practice, while political connections actually exert a significant positive influence, thus encouraging companies to be more aggressive in tax avoidance, overall, these findings underscore that foreign ownership structures and leadership qualities can be tools effective at reducing this tendency, while political involvement often exacerbates the situation.

Keywords : Foreign Ownership; Executive Character; Political Connections; *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak adalah kewajiban yang harus disetor kepada negara oleh individu dan entitas yang bersifat wajib digunakan untuk kepentingan negara dan tanpa imbalan langsung demi kesejahteraan masyarakat yang optimal (Resmi., 2019). Fungsi pajak yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam mendistribusikan barang dan jasa untuk kepentingan umum (Pohan., 2019). Maka dari itu pajak berfungsi sebagai penerimaan (*budgeter*), dimana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai proyek. Selain itu, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sering mengalami defisit, mayoritas penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam APBN dan sekarang merupakan bagian terbesar dari penerimaan negara (Sugiarto et al., 2024). Perolehan pajak dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Databoks – Katadata mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023.

Dilihat dari grafik 2, bahwa penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami kenaikan mulai dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp 628,2 triliun hingga diperkirakan mencapai Rp 1.869,2 triliun atau setara dengan 102,8% dari target yang ditetapkan di tahun 2023 dan 108,8% dari target APBN (Rasyid & Amaliyah., 2024). Walaupun penerimaan pajak mengalami pertumbuhan, rasio pajak terhadap PDB Indonesia mengalami kendala, di lihat dari grafik di 2 menunjukkan tren yang fluktuatif, mulai dari tahun 2011 meningkat 11,3% dan sempat turun pada tahun 2020 yaitu 8,4% dan mulai meningkat kembali mencapai 10,3% pada tahun 2023, tetapi ini tercatat menurun di bandingkan *tax ratio* pada tahun 2022. Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2023 terus menunjukkan kinerja yang positif. Meski demikian, *tax ratio* pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,39%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun penerimaan pajak terus meningkat, upaya pemerintah untuk meningkatkan basis pajak dan efisiensi pemungutan pajak masih menjadi tantangan agar *tax ratio* di Indonesia dapat mencapai level yang lebih optimal.

Kegiatan melakukan pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi semua individu maupun badan, namun seringkali ada upaya menghindari pembayaran pajak, yang dikenal sebagai perlawanan terhadap pajak. Upaya untuk mengelak dari kewajiban pajak atau mereduksi berapa banyak pajak yang dibayarkan menjadi hambatan dalam proses pengumpulan pajak, sehingga praktik penghindaran ini bisa memengaruhi tingkat penerimaan pajak negara (Setiawan & Ammar., 2022). Masalah perencanaan pajak merupakan salah satu kendala dalam menerapkan prinsip pemungutan pajak untuk meningkatkan keputusan sukarela wajib pajak dan memastikan penegakan hukum yang adil (Putra & Rahayu., 2023)

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan aksi resmi atau hukum yang dikerjakan oleh perusahaan dengan mencari cara untuk menurunkan pendapatan laba, sehingga

dapat mengurangi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak (Devi et al., 2022). Praktik *tax avoidance* di kalangan perusahaan dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Faktor dalam perusahaan dapat dilihat melalui karakteristik manajemen eksekutif, misalnya latar belakang dan pengalaman, mempengaruhi pendekatan perusahaan terhadap perpajakan. Struktur kepemilikan, terutama kepemilikan asing juga dapat menjadi faktor pendorong untuk mengecilkan jumlah beban pajak, tidak terlepas dari keinginan untuk memaksimalkan keuntungan. Dilihat dari faktor eksternal, celah dan kompleksitas dalam perpajakan mengantarkan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkannya, terlebih lagi dari koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan memberikan akses pada pengaturan perpajakan yang lebih menguntungkan, dan kurangnya pengawasan dalam penegakan hukum yang efektif, akan memicu (*tax avoidance*). Dengan begitu faktor kepemilikan asing, karakter eksekutif dan koneksi politik akan menjadi faktor pemicu utama terjadinya *tax avoidance*

Kepemilikan asing mengacu pada presentase saham suatu perusahaan atau yang dimiliki oleh entitas hukum, individu, pemerintah, dan bagiannya yang merupakan subjek pajak diluar negeri (Susilawati & tarmidi.,2024). Kepemilikan asing atau entitas luar yang memiliki stidaknya 20% saham dianggap memiliki kontrol yang signifikan atas operasi bisnis dan disebut pemegang saham pengendali asing (Madani & Djohar.,2024). Semakin banyak porsi saham biasa dimiliki oleh investor asing dalam sebuah perusahaan, semakin besar peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses membuat keputusan. Jadi, semakin tinggi presentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, mereka lebih cenderung lebih memilih untuk menerapkan penghindaran pajak agar keuntungan perusahaan dapat dioptimalkan dan pihak asing mendapatkan imbal hasil yang sesuai, sehingga menurut (Susilawati & tarmidi., 2024) kepemilikan asing punya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian oleh (Zarkasih & Maryati.,2023) menunjukkan kepemilikan asing tidak memberikan dampak signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Ini terjadi karena percaya yang pihak eksternal sangat memperhatikan keterbukaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Karakter eksekutif mencerminkan sosok pemimpin yang dapat bersikap sebagai berani dalam pengambilan risiko atau tidak berani dalam pengambilan risiko, tergantung pada tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Ketika risiko perusahaan meningkat, eksekutif cenderung mengambil sikap *risk taker*, sebaliknya ketika risiko perusahaan menurun, mereka cenderung bersikap *risk averse* (Sopian et al., 2023). Dimana *risk taker* merupakan karakter eksekutif yang dimiliki seseorang atau pimpinan berupa keberanian dalam pengambilan keputusan walaupun keputusan yang di ambil memiliki konsekuensi dan risiko yang tinggi. Sementara itu, *risk averse* adalah kebalikan dari *risk taker*. Karakter *risk averse* mencerminkan sosok eksekutif atau pemimpin yang kurang berani mengambil risiko tinggi, sehingga cenderung memilih keputusan

dengan tingkat terendah bagi perusahaan. Menurut (Sidauruk & Putri, 2022). Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Haztania & Lestari, 2023). menunjukkan Karakter eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh karakter eksekutif yang meliputi *risk taker* dan *risk averse* tergantung pada keberanian dalam mengambil risiko

Koneksi politik atau hubungan politik, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hubungan yang dapat mempercepat dan mempermudah pembagian urusan atau aktivitas. Sementara itu, politik dalam KBBI merujuk pada pengertian tentang ketatanegaraan, yang mencakup sistem pemerintahan dan prinsip – prinsip pemerintahan. Perusahaan yang memiliki relasi atau koneksi politik mengacu pada perusahaan yang memiliki hubungan tertentu dalam bidang politik atau berkolaborasi dengan politisi atau negara. Suatu bisnis atau perusahaan yang memiliki hubungan politik adalah yang membangun keterkaitan dekat dengan pemerintah untuk meraih keuntungan, seperti pengawasan pajak yang lebih lunak yang dapat mengarah pada penghindaran pajak. Menurut (Haztania & Lestari, 2023), koneksi tersebut berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Studi mengenai *tax avoidance* sudah dilaksanakan secara luas, namun hasil dari berbagai penelitian tidak menunjukkan keselarasan, sehingga menjadi celah yang penting untuk dikaji kembali. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada variabelitas - variabelitas yang bersumber dari dalam perusahaan atau variabelitas – variabelitas yang berasal dari sumber luar perusahaan, seperti penelitian (Ikhlasul et al., 2022) yang meneliti tentang variabelitas - variabelitas internal, seperti *Return On Asset*, pertumbuhan penjualan, karakter eksekutif, dan profitabilitas. Sementara itu penelitian (Az'ari & Lastiati., 2022) hanya meneliti variabelitas – variabelitas eksternal perusahaan, seperti kepemilikan asing dan hubungan politik.

Selain itu, temuan empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dimana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif, negatif, ataupun tidak berpengaruh sama sekali. Disisi lain sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan terhadap praktik *tax avoidance* karena beban pajak yang tinggi dan kedekatannya dengan kepentingan regulasi pemerintah. Celah penelitian ini memperlihatkan masih minimnya penelitian yang mengkombinasikan kepemilikan asing, karakter eksekutif, dan koneksi politik secara simultan pada sektor pertambangan, terutama dengan menggunakan periode terbaru pasca pandemi.

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan pertambangan berbasis BEI, yang memiliki ciri khas berbeda di banding sektor lain karena tingginya eksposur terhadap kebijakan regulasi dan sebagai salah satu bidang yang sangat rentan terhadap *tax avoidance* (Az'ari & Lastiati, 2022). Kombinasi variabel – variabel yang di gabung antara variabel dari dalam perusahaan dan

dari luar perusahaan seperti kepemilikan asing, karakter eksekutif, dan koneksi politik sebagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance* belum banyak di bahas secara bersamaan dalam penelitian terdahulu, terutama di sektor pertambangan Indonesia. Sebagian besar penelitian biasanya hanya melihat pengaruh satu atau dua variabel tersebut terhadap *tax avoidance*. Memasukan karakter eksekutif sebagai salah satu faktor dalam *tax avoidance* memberikan kebaruan, terutama karena karakter eksekutif sering kali bersifat subjektif dan kompleks dalam pengukurannya.

Tujuan penelitian atau studi ini adalah untuk memahami kepemilikan asing, karakter eksekutif, dan koneksi politik memengaruhi penghindaran pajak. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua hal: teori dan praktik. Dari perspektif teori, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan asing, karakter eksekutif, koneksi politik, dan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga bisa jadi penduan untuk studi lanjutan dengan variabel yang sama tentang penghindaran pajak. Dari sisi praktis, bagi penulis, studi ini berfungsi sebagai cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak kepemilikan asing, karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak di perusahaan – perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa efek Indonesia. Harapan dari penelitian ini akan membrikan informasi berguna kepada pembaca di bidang akuntansi dan menjadi rujukan untuk penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik ini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (Mecking & Jensen., 1976) membahas interaksi antara agen, yang berfungsi sebagai manajemen perusahaan, dan prinsipal yang berfungsi sebagai pemilik. Sementara agen memiliki wewenang membuat keputusan terbaik untuk kepentingan prinsipal, prinsipal adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengarahkan agen untuk menyelesaikan tugas untuknya. Agen akan mengikuti dan mendukung semua arahan prinsipal ketika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama (Chenkiani & Presetrya., 2023).

Aspek krusial dalam penerapan teori keagenan adalah mencegah praktik penghindaran pajak serta situasi dimana satu pihak memiliki informasi tambahan atau lebih lengkap jika dibandingkan dengan lainnya. Ini terjadi karena manajemen memiliki informasi tambahan mengenai kondisi internal perusahaan atau organisasi dibandingkan dengan pemilik (prinsipal). Karena itu sangat memungkinkan terjadinya kecurangan dari manajemen yaitu dengan berupaya meningkatkan keutungan melalui beberapa cara, yaitu melakukan manajemen laba dan *tax avoidance* secara hukum, dengan cara menyamarkan laba dan menurunkan pajak yang dikenakan (Setiawati & Ammar., 2022). Perusahaan pertambangan yang mempunyai

karakteristik unik di banding sektor lain karena tingginya eksposur terhadap kebijakan regulasi dan pajak. Dengan adanya kombinasi anantara kepemilikan asing, karakter eksekutif dan koneksi politik di dalamnya akan memicu terjadinya *tax avoidance* karena dilihat dari kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait penghindaran pajak dengan investor asing akan mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi sehingga manajemen akan meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba. Karakter eksekutif mempunyai *risk taker* akan berani dalam pengambilan keputusan sehingga bisa melakukan praktik *tax avoidance*, dan memaksimalkan laba. Koneksi politik dengan memanfaatkan hubungan yang dekat dengan pemerintah akan mendapatkan informasi kebijakan perpajakan yang bisa menguntungkan, dengan hal ini perusahaan dapat menurunkan pajak secara legal sehingga akan memicu terjadinya praktik *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak yaitu upaya yang dilakukan bisnis atau perusahaan dalam perpajakan untuk mengecilkan kewajiban pajak dengan mencari serta memanfaatkan celah yang ada dalam regulasi perpajakan suatu negara. Akan tetapi, tindakan ini dapat berdampak buruk pada penerimaan di negara itu (Ayustina & Safi'i., 2023). Membedakan penghindaran pajak dari penggelapan pajak itu sulit, karena secara teknis keduanya saling berkaitan, sehingga sering kali sulit dibedakan, terutama dipengaruhi oleh kompleksitas hukum di negara tersebut (Pohan., 2019). Namun, penghindaran pajak dapat terjadi akibat celah dalam regulasi pajak, sehingga praktik ini menjadi rumit dan khas, karena meskipun diizinkan, tetap tidak diinginkan. Ada sejumlah cara yang bisa dipakai untuk menghitung penghindaran pajak, yaitu CETR (*Cash Effective Tax Rate*), ETR (*Effective Tax Rate*), BTD (*Book Tax Differences*), dan METR (*Marginal Effective Tax Rate*). Penghindaran pajak pada studi ini dihitung memakai CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing merupakan kegiatan penanaman modal asing merujuk pada investasi yang dilakukan oleh pihak luar untuk menanamkan modalnya di wilayah Republik Indonesia. Dalam konteks ini, penanaman modal asing di artikan sebagai individu, badan usaha, atau pemerintah yang berasal dari luar negeri (Susilawati & Tarmidi, 2024). Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing adalah perseorangan, pemerintah dan badan hukum Indonesia yang memiliki saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan asing. Kepemilikan asing pada penelitian ini dihitung dengan jumlah total saham kepemilikan asing di bagi dengan total saham yang dijual. Menurut (Yoshida, 2023) kepemilikan asing yang signifikan berpengaruh pada pengambilan keputusan terkait kebijakan bisnis dan kebijakan pajak. Oleh karena itu dimungkinkan bagi bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif yaitu ciri yang dikuasi oleh setiap pemimpin organisasi tingkat atas yang berfungsi memberikan panduan dalam melaksanakan aktivitas bisnis dan menentukan keputusan atau kebijakan bisnis sesuai dengan sasaran yang diinginkan dicapai perusahaan. Karakter eksekutif dalam studi ini diukur dengan risiko perusahaan (*corporate risk*). Eksekutif yang memiliki karakter aversi terhadap risiko cenderung menghindari konsekuensi besar, sehingga mereka akan menjauh dari praktik penghindaran pajak. Sebaliknya eksekutif yang siap menghadapi risiko akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan (Setyawan, Agustina & Lia., 2022). Terkait dengan penghindaran pajak, ada kaitan antara risiko dan cara – cara penghindaran pajak (Ikhlusul et al., 2022).

Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada hubungan yang berhubungan dengan seberapa mudah pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan mereka. Perusahaan dengan hubungan politik akan lebih mudah memperoleh akses informasi dari pemerintah, sehingga mereka dapat dengan lebih mudah melakukan praktik penghindaran pajak (Amyartha & Fidiana., 2022). Jaringan politik dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Salah satunya keuntungan yang didapat perusahaan dari hubungan politik adalah kemudahan akses terhadap pinjaman. Dalam studi ini, koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu variabel yang mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif dengan memberikan kode 0 bagi perusahaan yang tidak menunjukkan tanda – tanda koneksi politik dan kode 1 bagi perusahaan yang memiliki tanda – tanda koneksi politik (Istiqfarosita & Abdani., 2022). Inspeksi pajak yang minim juga adalah salah satu keuntungan dari hubungan politik perusahaan, agar perusahaan tidak khawatir tentang perencanaan pajak mereka (Az'ari & Lastiati., 2022).

H1: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menggambarkan ada hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik modal), dimana agen (manajemen) bertanggung jawab dalam mengelola dana yang dimiliki oleh prinsipal. Kepemilikan asing dianggap sebagai pemilik utama yang memberikan otoritas kepada agen (manajemen) untuk mengelola investasi. Jumlah saham pihak asing dalam sebuah perusahaan berkorelasi positif dengan kekuatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan penelitian (Madani & Djohar., 2024). Investor yang menginvestasikan dananya di perusahaan yang dipilih berharap perusahaan itu dapat memberikan tingkat pengembalian sesuai dengan harapan pihak luar. Sehubungan dengan itu kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan akan menyebabkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), untuk mendapatkan pengembalian yang optimal dan mengurangi beban pajak. Sesuai dengan penelitian (Susilawati & Tarmidi., 2024) menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat

memudahkan dalam menghindari pajak akibat loyalitas yang lebih rendah terhadap negara dan lebih fokus pada pencapaian keuntungan yang maksimal.

H2: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menjelaskan bagaimana prinsipal, yang berfungsi seperti pemilik atau pemegang saham, dan agen, yang berfungsi sebagai eksekutif dengan otoritas pengambilan keputusan. Selanjutnya, eksekutif adalah orang – orang yang memiliki peran penting bagi perusahaan karena mereka memiliki kemampuan dan kekuatan terbaik untuk mengatur operasinya (Firmansyah & Pratiwi., 2024). Dimana agen mempunyai akses informasi yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan yang sebenarnya dibandingkan prinsipal (Haztania & Lestari., 2023). Seorang pemimpin perusahaan dapat memiliki karakter dalam menentukan risiko, yaitu bersedia *risk taker* atau *risk averse*. Semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif yang memiliki kecenderungan mengambil risiko, sedangkan semakin kecil risiko perusahaan mencerminkan eksekutif yang lebih cenderung menghindari risiko. Di dukung oleh penelitian (Sopian et al., 2023) menunjukkan bahwa pemimpin perusahaan yang mengambil risiko lebih berani dalam mengambil keputusan, seperti mengambil tindakan penghindaran pajak. Kemungkinan bisnis untuk mengambil tindakan penghindaran pajak tumbuh seiring dengan tingkat risiko yang diambil oleh pemimpin berisiko. Sebanding dengan studi yang dilangsungkan oleh (Haztania & Letari., 2023) menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif bagi penghindaran pajak.

H3: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menjelaskan dinamika hubungan politik dalam konteks perusahaan, antara prinsipal sebagai pemilik modal dan agen sebagai manajemen, dengan memanfaatkan jaringan politik untuk strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik akan memperoleh perlindungan negara, akses yang lebih cepat untuk mendapatkan pinjaman, dan mengalami risiko audit pajak yang lebih tinggi dalam penghindaran pajak yang akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya transparansi keuangan (Iksan et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Dewi & Pramanaswari., 2024), bisnis yang memiliki hubungan politik juga dapat menemukan cara untuk memaksimalkan sumber daya keuangan mereka melalui pemanfaatan celah pajak dan penerapan struktur pajak yang kompleks untuk menekan beban pajak mereka, semua dengan dukungan dari kekuatan politik. Investasi dalam bidang ekonomi dan politik menghasilkan penghindaran pajak yang biasa, dimana keuntungan dimaksimalkan dengan memanfaatkan relasi politik untuk praktik *tax avoidance*. Sesuai dengan penelitian (Juliana & setiawan., 2022) yang menunjukkan bahwa hubungan politik berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sehingga, jaringan politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat berfungsi

sebagai pendorong bagi mereka untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan memanfaatkan hubungan tersebut (Karuniasari & Noviari., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

Desain Penelitian

Untuk menentukan pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen dipelajari dengan menggunakan metodologi kuantitatif yang dikenal sebagai asosiatif kausal. Laporan keuangan tahunan, dengan perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2024 merupakan sumber data sekunder yang digunakan.

Objek Penelitian

Perusahaan di bidang pertambangan yang masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2024 adalah objek penelitian ini. Data yang ada dalam laporan tahunan menarik perhatian, terutama informasi tentang kepemilikan asing, karakter eksekutif, koneksi politik, dan praktik penghindaran pajak. Sebabnya, objek yang diteliti bukan hanya berupa entitas perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga indikator – indikator khusus dalam struktur kepemilikan, profil manajemen puncak, serta aspek hubungan politik yang ada pada setiap perusahaan, untuk dianalisis pengaruhnya terhadap kecenderungan perusahaan dalam penghindaran pajak

Sampel Penelitian

Sampel studi ini diambil dengan menggunakan pendekatan *non-probability sampling* melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berlandaskan kriteria khusus seperti yang dijelaskan oleh (Puspitasari et al., 2022). Kriteria yang diterapkan meliputi perusahaan sektor pertambangan yang masuk daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) antara rentang 2021 – 2024, perusahaan yang telah merilis laporan keuangan tahunan yang komperhensif selama periode tersebut, perusahaan melaporkan laporan keuangannya dalam rupiah dan memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk menghitung seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data/ Instrumen

Pada studi ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu melalui observasi, analisis, pembacaan, dan pemeriksaan berkas perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Data diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indoensia (BEI) untuk tahun 2021 – 2024,

yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indoensia <https://www.idx.co.id/id> teknik ini dipilih karena dapat memberikan data sekunder yang komperhensif dan sesuai dengan variabel yang diteliti

Analisis Data

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu pengujian pengaruh dan penggunaan metode untuk menganalisis data dengan aplikasi SPSS. Melalui berbagai jenis pengujian seperti statistik deskriptif. Uji asumsi klasik yang terdiri (Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi) dan analisis regresi linier berganda)

Definisi operasional

Tax Avoidance

Studi ini berfokus pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Istilah *tax avoidance* merujuk pada startegi penghemat pajak, dimana hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan regulasi perpajakan yang berlaku secara sah guna mengurangi kewajiban pajak (Madani & Djohar., 2024) oleh karena itu, penghindaran pajak adalah tindakan pengaturan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang atas pajak perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan mengecilkan bebannya melalui regulasi yang ada. Pengukuran variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam studi ini dilaksanakan menggunakan CETR (*Cash effectif Tax Rate*). CETR digunakan untuk menghitung seberapa banyak perusahaan menghindari pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah CETR (*Cash Effectif Tax Rate*) adalah sebagai berikut: (Madani & Djohar., 2024)

$$CETR = \frac{PEMBAYARAN PAJAK}{LABA SEBELUM PAJAK}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing menggambarkan aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh warga negara, badan usaha dan pemerintah asing di negara Indonesia, untuk mengukur variabel independen, kepemilikan asing, jumlah presentase saham investor asing dihitung dengan rumus berikut: (Susilawati & Tarmidi, 2024)

$$KEPEMILIKAN ASING = \frac{TOTAL SAHAM KEPEMILIKAN ASING}{SAHAM YANG BEREDAR} \times 100\%$$

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif yakni sifat eksekutif yang dikuasai oleh pimpinan setiap perusahaan, pimpinan yang memiliki karakter kurang berani dalam pengambilan risiko di sebut sebagai *risk averse* sedangkan pimpinan yang memiliki karakter yang berani dalam pengambilan risiko tinggi disebut *risk taker*, dalam penelitian ini, pengukuran variabel independen, yaitu karakter

eksekutif, digunakan untuk menentukan risiko perusahaan (*corporate risk*). Yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: (Setyawan, Agustin & Lia.,2022)

$$CORPORATE RISK = \frac{EBIT}{TOTAL ASET}$$

Keterangan:

EBIT : *Earning Before Interest, Tax*

Koneksi Politik

Koneksi politik mangacu pada terjalinnya suatu ikatan atau hubungan istimewa antara perusahaan dengan negara atau pemerintah, sehingga dimungkinkan perusahaan mendapatkan pemeriksaan pajak yang rendah, sehingga mendorong bisnis untuk mengurangi pajak, dalam penelitian ini, pengukuran varaibel independen yaitu koneksi politik digunakan variabel dummy. Variabel yang mengkuantitatifkan data kualitatif disebut variabel dummy yakni dengan menetapkan kode 0 untuk perusahaan yang tidak menunjukkan koneksi politik dan kode 1 untuk perusahaan yang menunjukkan koneksi politik (Istiqfarosita & Abdani, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Statistik Deskriptif

Berlandaskan temuan analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel 2, terlihat bahwa dari 19 perusahaan dengan total sampel sebanyak 76, variabel (Y) penghindaran pajak (*tax avoidance*) menunjukkan skor minimal 0,06, skor maksimal 0,69, skor rata – rata 0,2336, dan deviasi standar 0,111191. Variabel (X1) kepemilikan asing menunjukkan skor minimal 0,00, skor maksimal 0,51, skor rata – rata 0,1063, dan deviasi standar 0,10541. Variabel (X2) karakter eksekutif menunjukkan skor minimal 0,00, skor makssimum 0,33, skor rata – rata 0,1061, dan deviasi standar 0,08136. Dan untuk variabel (X3) koneksi politik, skornya mencakup minimal 0,00, maksimal 1,00, rata – rata 0,7895, dan deviasi standar 0,41039.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas yang tertera di tabel 3 dilangsungkan dengan metode *one-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,121. Angka tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal dan memenuhi syarat uji asumsi klasik

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas pada tabel 4 menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,100 dan VIF memiliki nilai < 10.00 maka data tidak terdapat gejala multikolinearitas dan data lolos uji asumsi klasik, dari tabel di atas menunjukkan bahwa X1 kepemilikan asing memiliki nilai (tolerance 0.961 > 0.100, nilai VIF 1.041 < 10.00), X2 karakter eksekutif memiliki nilai (tolerance 0.965 > 0.100, nilai VIF 1.036 < 10.00) dan X3

koneksi politik memiliki nilai (tolerance $0.993 > 0.100$, nilai VIF $1.007 < 10.00$), maka dapat disimpulkan data lolos uji asumsi klasik multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Hasil tes heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel 5 menggunakan metode *gejler*. Dilihat nilai sig menunjukkan bahwa variabel X1 kepemilikan asing memiliki nilai ($0.995 > 0.05$), variabel X2 karakter eksekutif memiliki nilai ($0.430 > 0.05$) dan variabel X3 koneksi politik memiliki nilai ($0.069 > 0.05$) yaitu semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05. Dengan begitu, hal ini menandakan bahwa uji heteroskedastisitas lolos uji asumsi klasik.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada tabel 6 dan tabel 7 ini menggunakan metode Durbin-Watson yaitu dengan membandingkan nilai dU pada tabel 9 dengan nilai DW hitung dan nilai 4-du, jika nilai dU pada tabel 6 $<$ nilai DW hitung $<$ nilai 4-du, maka data berdistribusi normal, dilihat pada tabel 9 menunjukkan nilai dU sebesar (1.7104), pada tabel 7 menunjukkan nilai DW hitung sebesar (1.958), dan nilai 4-dU: $4 - 1.7104 = (2.2896)$, jadi ($1.7104 < 1.9580 < 2.2896$). oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi lolos uji asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hasil dari analisis regresi linier berganda pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta adalah 0,245. Ini berarti bila diasumsikan nilai kepemilikan asing (X1), karakter eksekutif (X2), dan koneksi politik (X3) sama dengan nol, maka nilai penghindaran pajak (Y) menjadi 0,245. Koefisien untuk variabel (X1) kepemilikan asing tercatat -0,347, yang berarti jika kepemilikan asing meningkat satu unit, maka penghindaran pajak akan menurun sebanyak 0,347. Asumsi yang diambil adalah variabel independen lainnya tetap. Koefisien untuk variabel (X2) karakter eksekutif tercatat -0,433, yang menunjukkan bahwa jika karakter eksekutif sebesar 0,433. Asumsi yang digunakan adalah variabel independen lainnya tetap. Koefisien untuk variabel (X3) koneksi politik adalah 0,091, yang menunjukkan pajak bahwa jika koneksi politik meningkat satu unit, maka penghindaran pajak akan bertambah sebanyak 0,091. Asumsi yang diambil adalah variabel independen lainnya tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji-t pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel (X1) yaitu kepemilikan asing sebesar $0,002 < 0,05$ yang artinya bahwa variabel kepemilikan asing memberikan dampak parsial terhadap *tax avoidance*.

Variabel (X2) yaitu karakter eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ yang artinya variabel independen karakter eksekutif memberikan dampak parsial terhadap *tax avoidance*.

Variabel (X3) yaitu koneksi politik memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya variabel independen koneksi politik memberikan dampak parsial terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa “kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*” penelitian sebelumnya juga mendukung temuan penelitian ini (Yustia & Khosmisiyah., 2024) dan (Safira et al., 2022) yang menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dari kepemilikan asing. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat penghindaran pajak turun seiring dengan jumlah kepemilikan asing di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensi. Ini sejalan dengan temuan (Rahmawati & Lisiantara., 2022) yang menyatakan bahwa lebih banyak kepemilikan asing dalam perusahaan berarti risiko penghindaran pajak lebih rendah. Fenomena ini mungkin terjadi karena para investor asing lebih memprioritaskan reputasi perusahaan dalam jangka panjang dan lebih memprioritaskan kepatuhan pada hukum serta norma pajak sehingga mereka cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Penemuan studi ini menunjukkan bahwa sifat eksekutif atau karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ini bertentangan dengan hipotesis (H2), yang menyatakan bahwa “karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*” hasil penelitian ini selaras dengan temuan studi (Maulina & Ma’ruf., 2024) serta (Azzahra & Prastiani., 2024) yang juga menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif yang signifikan. Penemuan ini mengungkapkan bahwa pemimpin dalam perusahaan memiliki sifat eksekutif yang cenderung menghindari risiko, yang artinya mereka kurang berani mengambil keputusan yang berisiko. Akibatnya eksekutif perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI lebih suka menghindari praktik *tax avoidance* dan tidak mengambil risiko untuk menurunkan beban pajak yang harus mereka tanggung

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini memenuhi pernyataan (H3) bahwa “koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*” penelitian ini didukung oleh penelitian (Istiqfarosita & Abdani, 2022) dan penelitian (Hanif et al., 2023)) yang menyatakan koneksi politik berpengaruh positif. Penelitian ini menemukan bahwa jika perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkatkan koneksi politiknya, tingkat penghindaran

pajaknya juga akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa koneksi politik mendorong perusahaan untuk menghindari pajak, yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah..

KESIMPULAN

Analisis data dan diskusi yang telah diselesaikan menetapkan bahwa karakter eksekutif dan kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap upaya menghindari pajak, sebaliknya koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap upaya menghindari pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indoensia dari periode 2021 hingga 2024. Artinya, semakin banyak kepemilikan asing dan lebih banyak eksekutif yang takut risiko, semakin sedikit kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin kuat hubungan atau koneksi politik dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memanfaatkan celah kebijakan untuk menekan beban pajak secara agresif. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen internal dan eksternal bisnis memiliki peran yang berbeda dalam mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini terbatas karena hanya berfokus pada sektor pertambangan dan menggunakan variabel yang relatif terbatas, sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh industri. Selain itu, penggunaan data sekunder membuat penelitian ini tidak mampu menggali motivasi perilaku *tax avoidance* secara lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Amyartha, A. M. A., & Fidiana. (2022). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Ayustina, A., & Saff'i, M. (2023). Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021). *JABEI*, 2.
- Az'ari, A. N., & Lastiati, A. (2022). PENGARUH KEPEMILIKAN DENGAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK. *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 17–25. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Azzahra, K., & Prastiani, S. C. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Capital Intensity Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate. *JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI*.
- Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). FRAUD DAN MONITORING DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN. *Jurnal Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.1016>
- Devi, Y., Saefurrohman, U. G., Rosila, W., Utamie, R. Z., & Nurhayati. (2022). ANALISIS PENYEBAB PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019. *JAP*.
- Dewi, I. G. P. E. R., & Pramanaswari, A. A. S. I. (2024). The Impact of Political Connection on Tax Avoidance; A Literature Review. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 390–396. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13676>
- Firmansyah, A., & Pratiwi, A. P. (2024). Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 16, Issue 1). <http://journal.maranatha.edu53>

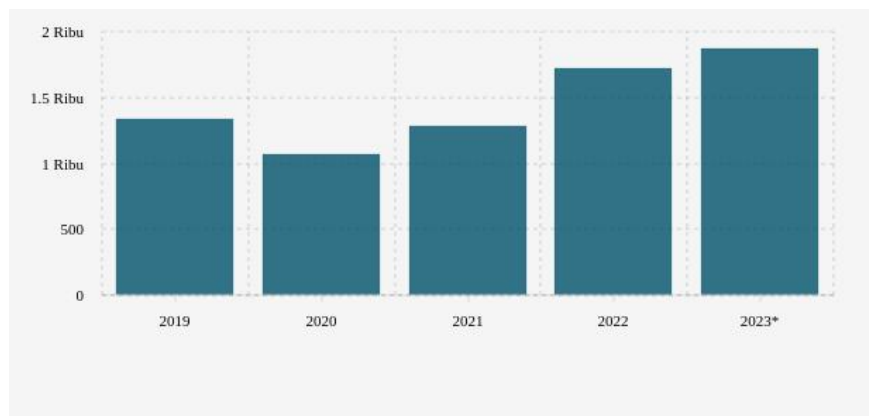
- Hanif, R. A., Sem, P. S., & Fajar, O. (2023). Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(1), 31–2023. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). PENGARUH TRANSFER PRICING, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Cakrawala-Repositori IMWI*, 6(1), 2023.
- Ikhlasul, M., Surya Abbas, D., & Hendrianto, S. (2022). Pengaruh Return On Asset, Sales Growth, Karakteristik Eksekutif dan Pofitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4). www.kompas.com.
- Iksan, A. M., Surya, S. A. R., & Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Aktivitas Asing, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing Dan Keuangan Vokasi*.
- Istiqfarosita, M., & Abdani, F. (2022). Political Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic. *JURNAL AKUNTANSI*, 32(5), 1238–1248. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Karuniasari, L. A., & Noviari, N. (2022). Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Koneksi Politik dan Tax avoidance. *JURNAL AKUNTANSI*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Madani, N. d, & Djohar, C. (2024). PENGARUH TRANSFER PRICING, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI PRIMER YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022). *Jurnal Nusa Akuntansi*.
- Maulina, L., & Mu'arif, S. (2024). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KARAKTER EKSEKUTIF DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.436>
- Puspitasari, D., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Borobudur Accounting Review*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/10.31603/bacr.6999>
- Putra, E. D., & Rahayu, N. (2023). PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA. *JURNAL DARMA AGUNG*.
- Rahmawati, I. D., & Lisiantara, G. A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. www.ortax.org,
- Rasyid, & Amaliyah., R. (2024). ANALISIS REALISASI PENERIMAAN WAJIB PAJAK PRIBADI USAHA ATAU UMKM DAN UPAYA KPP PRATAMA KEPANJEN DALAM MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Safira, M., Bisnis, F., & Teknologi dan Bisnis Kalbis Jalan Pulomas Selatan Kav, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. In *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis* (Vol. 8, Issue 4). www.tempo.co.
- Setiawati, A. R., & Ammar., M. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal MANOVA*, 2, 2685–4716.
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>

- Sopian, D., Wulan, L., & Intan, P. D. (2023). THE EFFECT OF PROFITABILITY, EXECUTIVE CHARACTER AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE. In *Management, Economics and Social Sciences. IJAMESC, PT. ZillZell Media Prima* (Vol. 1, Issue 6). <https://ekonomi.bisnis.com>
- Sugiarto, G. S., Wahyuni, N., Nasution, S., & Vientiany, D. (2024). Dasar-Dasar Penegetahuan Perpajakan Upaya Dalam Memotivasi Membayar Pajak. *SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 2(2), 365–371.
- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2024/v24i51286>
- Yoshida, D. (2023). THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION AND FOREIGN OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(05), 213–219. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4718>
- Yustia, L., & Khomsiyah, K. (2024). Pengaruh Kepemilikan Asing, Direktur dan Komisaris Asing Terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh Profitabilitas. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 390. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1437>
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus Edisi 11| Buku 1 yogyakarta : Salemba Empat
- Kementarian Sekretariat Negara. 2007. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Edisi Pertama. New York: Wiley.
- Setyawan, S., Agustina, D. H., & Lia, C. I. (2022). *Dimensi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Edisi Pertama. Malang: UMMPress.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). Edisi Ketiga. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&B. Bandung : Alfabeta
- Sugiarto, A. G., Wahyuni, N., Nasution, S., & Vientiany, D. (2024). Dasar-Dasar Penegetahuan Perpajakan Upaya Dalam Memotivasi Membayar Pajak. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 365-371.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

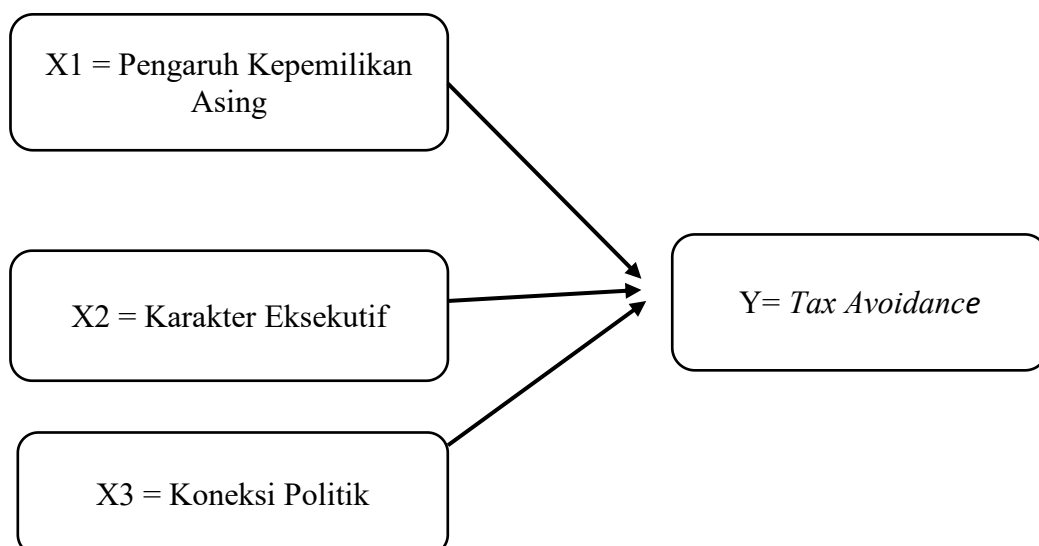
GRAFIK, GAMBAR, DAN TABEL



Grafik 1 Grafik Penerimaan pajak Indonesia (2019 – 2023)
Sumber: Databoks – Katadata data di olah tahun 2023



Grafik 2 Grafik Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Di Indonesia
Sumber: diolah dari data APBNKita dan Laporan



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2024	90
2.	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak publikasi laporan keuangan periode 2021 - 2024	(25)
3	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menyajikan mata uang rupiah di laporan keuangan periode 2021 - 2024	(42)
3.	Perusahaan pertambangan yang menyajikan mata uang rupiah tetapi tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dilaporan keuangan periode 2021 – 2024	(4)
4.	Jumlah perusahaan sampel	19
5	Jumlah Sampel (19 x 4 tahun)	76

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
KEPEMILIKAN ASING	76	0, 00	0,51	0,1063	0,10541
KARAKTER EKSEKUTIF	76	0, 00	0,33	0,1061	0,08136
KONEKSI POLITIK	76	0, 00	1, 00	0,7895	0,41039
TAX AVOIDANCE	76	0, 06	0,69	0,2336	0,11191
Valid N (listwise)	76				

Sumber Data: Olah Data SPSS

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std.Deviation		.09555986
Most Extreme Differences	Absolute		.134
	Positive		.134
	Negative		-.067
Kolmogorov-Smirnov Z			1.166
Asymp. Sig. (2-tailed)			.132
Sig			.121c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		Lower Bound	.113
		99% Confidence Interval	.130
		Upper Bound	
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber Data: Olah Data SPSS

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	KEPEMILIKAN ASING	.961	1.041
	KARAKTER EKSEKUTIF	.965	1.036
	KONEKSI POLITIK	.993	1.007

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber Data: Olah Data SPSS

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.357	.049		7.238	.000
	KEPEMILIKAN ASING	-.001	.161	-.001	-.007	.995
	KARAKTER EKSEKUTIF	-.181	.228	-.088	-.794	.430
	KONEKSI POLITIK	-.031	.017	-.194	-1.847	.069

a. Dependent Variable : Abs Res

Sumber Data: Olah data SPSS

Tabel 6. Tabel Durbin-Watson

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 ^a	.295	.255	.09724	1.958

a. Predictors: (Constant), KARAKTER EKSEKUTIF, KONEKSI POLITIK, KEPEMILIKAN ASING

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber Data: Olah Data SPSS

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.245	.032		7.730	.000
	KEPEMILIKAN ASING	-.347	.109	-.327	-3.187	.002
	KARAKTER EKSEKUTIF	-.433	.141	-.315	-3.070	.003
	KONEKSI POLITIK	.091	.028	.334	3.305	.001

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber Data: Olah data SPSS